



Kegiatan Dengan Alokasi Dana Kelurahan Sudah Diagendakan

Kelurahan Kotabaru Kebut SPJ

Kelurahan Kotabaru menyelenggarakan lokakarya Peranan Kampung dalam Pembangunan Wilayah Kelurahan Kotabaru, yang merupakan kegiatan kedua yang dilakukan pihak kelurahan menggunakan dana kelurahan, Senin (22/4).

urah Kotabaru, Supardi, menjelaskan bahwa bulan ini terdapat dua kegiatan yang menggunakan dana kelurahan tersebut. Sebelumnya telah dilaksanakan lokakarya bimbingan teknis perencanaan pembangunan wilayah pada 15 April 2019 lalu. "Biaya untuk dua kegiatan di bulan April ini Rp19 juta. Sebenarnya ada 3 kegiatan, tapi kami terkendala waktu karena dana kelurahan turun pertengahan bulan sementara SPJ (surat pertanggungjawaban) harus diselesaikan akhir bulan," ungkapnya kepada *Tribun Jogja*.

Supardi mengatakan, total dana kelurahan yang diterima Kelurahan Kotabaru adalah Rp352 juta. Namun uang tersebut seluruhnya berada di Pemerintah Kota Yogyakarta, tepatnya di Badan Perencanaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

"Jadi untuk pencairan dana kelurahan ini, pihak kelurahan yang harus aktif. Setelah menyerahkan SPJ, maka dana kelurahan bisa dicairkan. Jadi sistemnya kami nalangi dulu. Tapi sejauh ini tidak ada kendala," ungkapnya.

Secara keseluruhan, dana kelurahan di Kotabaru aman digunakan sesuai peruntukan yakni untuk pemberdayaan masyarakat serta untuk pembangunan fisik.

la mengatakan, untuk pembangunan fisik, yang paling mendesak adalah pembangunan jalan inspeksi di RT 1 dan RW 1 Kotabaru yang merupakan daerah kantong kemiskinan.

"Pembangunan ini sangat penting. Di samping sebagai jalur evakuasi, harapan kami kalau jalan sudah terbentuk bisa untuk sirkulasi pemberdayaan masyarakat

● ke halaman 15



TRIBUN JOGJA/KURNIATUL HIDAYAH

PEMBERDAYAAN - Kegiatan pemberdayaan yang bersumber dari dana kelurahan dilaksanakan oleh Kelurahan Kotabaru, Senin (22/4).

Kelurahan Kotabaru Kebut SPJ

• Sambungan Hal 9

dan peningkatan perekonomian karena di sana banyak KSJPS yang ada di bantaran Sungai Code. Selain berfungsi sebagai jalan, nantinya juga sebagai lorong sayur," tandasnya.

Namun, lanjutnya, terkait personel di kelurahan, ia mengaku kewalahan. Pasalnya, ia dan juga 4 PNS lain yang ada di Kelurahan Kotabaru harus merangkap tugas untuk bisa mengelola dana kelurahan tersebut.

"Tenaga teknis belum ada. Kalau untuk tenaga di dana kelurahan, PNS yang ada ada yakni lurah, sekretaris lurah, kasi pemberdayaan, kasi pemerintahan dan ketenteraman ketertiban,

dan kasi pelayanan. Semua merangkap. Misal lurah sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sekretaris lurah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan seterusnya," tandasnya.

Ia berharap, agar tahun ini atau maksimal tahun depan, pemerintah memberikan tambahan personel di kelurahan untuk membantu pengelolaan dana kelurahan tersebut dan memastikan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan baik.

Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Kelurahan Kotabaru, Agus Hariyadi, mengatakan bahwa kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik.

"Kalau fisik ini mekanismenya berbeda dengan pemberdayaan, kita menyil-

apkan dokumen administrasinya selanjutnya dana akan diberikan langsung kepada pihak ketiga. Jadi dana tidak melalui kita," bebernya.

Setidaknya dana kelurahan yang terpakai untuk kegiatan fisik di Kotabaru adalah Rp265 juta dari total Rp352 juta. Selanjutnya dari Rp265 juta tersebut paling besar digunakan untuk membangun jalan inspeksi di bantaran Sungai Code dengan panjang kurang lebih 60-80 meter dengan anggaran Rp190 juta. "Kegiatan fisik lain yakni pembuatan lorong sayur, bak lele cendol, dan SPAH (Sistem Pemanfaatan Air Hujan) totalnya sekitar Rp75 juta. Kegiatan fisik ini akan dilaksanakan setelah Lebaran," bebernya.

Kegiatan lain yang di luar kegiatan fisik yakni pember-

dayaan selain yang sudah dilangsungkan yakni ada sarasehan rintisan kelurahan budaya, pelatihan budidaya sayuran, dan pelatihan budidaya lele cendol.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pengelola keuangan dana kelurahan hanya bisa dilakukan oleh PNS. Sementara jumlah personel yang ada di kelurahan pas-pasan, sehingga langkah yang ditempuh adalah memperbantukan PNS dari kecamatan.

"Sudah beberapa kali kami melakukan pelatihan karena aturan melekat di dana kelurahan. Merangkap iya, tapi tidak ada masalah dari segi pengelolaan. Di kelurahan enggak ada yang khusus mengelola keuangan. Selebihnya bisa dibantu tenaga teknis," ucapnya.

(Kurniatul Hidayah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Kotabaru	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005